

**MUATAN PENDIDIKAN KEWARANEGARAAN  
SEBAGAI UPAYA MEMBELAJARKAN *CIVIC KNOWLEDGE*, *CIVIC SKILLS*,  
DAN *CIVIC DISPOSITION* DI SEKOLAH DASAR**

Hendita Rifki Alfiansyah<sup>1\*</sup>, Muhammad Nur Wangid<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Negeri Yogyakarta

<sup>1</sup>Jl. Colombo No. 1, Depok, Sleman 55281, Yogyakarta, Indonesia

\* Corresponding Author. Email: [hendita.rifky2016@student.uny.ac.id](mailto:hendita.rifky2016@student.uny.ac.id)

**Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui muatan pendidikan kewarganegaraan di lingkup siswa sekolah dasar sebagai upaya membelajarkan civic knowledge, civic skills, dan civic dispositions. Penelitian ini merupakan studi literature yang membahas pentingnya muatan pendidikan kewarganegaraan di lingkup siswa sekolah dasar sebagai upaya membelajarkan civic knowledge, civic skills, dan civic dispositions. Muatan pendidikan kewarganegaraan terutama di lingkup siswa sekolah dasar menjadi kunci penting dalam memberikan pemahaman kepada siswa akan pentingnya konsep kewarganegaraan, menumbuhkan pengetahuan tentang bernegara, keterampilan bernegara, serta karakter bernegara. Hasil studi yang dilakukan menunjukkan bahwa muatan pendidikan kewarganegaraan menjadi salah satu alternatif cara dari pemerintan dalam mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang aktif.*

**Kata kunci:** pendidikan kewarganegaraan, sekolah dasar, warga negara yang aktif

**THE CONTENT OF CITIZENSHIP EDUCATION AS AN EFFORT  
TO LEARN CIVIC KNOWLEDGE, CIVIC SKILLS, AND CIVIC DISPOSITION  
IN ELEMENTARY SCHOOL**

**Abstract**

*This study aimed to determine the urgency of the content of citizenship education in the scope of elementary school students. This research was a literature study that discussed the importance of the content of citizenship education in the scope of elementary school students as an effort to learn civic knowledge, civic skills, and civic dispositions. The content of citizenship education, especially in the scope of elementary school students was an important key in providing students with an understanding of the importance of the concept of citizenship, fostering knowledge about the state, state skills, and character of the state. The results of the study conducted show that the content of citizenship education was an alternative way of government in preparing students to become active citizens.*

**Keywords:** citizenship education, elementary school, active citizens

## PENDAHULUAN

Pendidikan kewarganegaraan merupakan aspek penting dalam perkembangan keberlangsungan manusia. Pendidikan kewarganegaraan menjadi sarana memanusiakan manusia dan membentuk manusia menjadi manusia sepenuhnya. Melalui pendidikan kewarganegaraan inilah, setiap individu perlu mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai upaya untuk mempersiapkan dirinya menghadapi konteks kehidupan bermasyarakat yang lebih luas. Tujuan pendidikan kewarganegaraan yaitu menghasilkan warga negara yang kompeten, reflektif, peduli, dan partisipatif yang akan memberikan kontribusi pada perkembangan masyarakat dan negara dengan semangat patriotisme dan demokrasi (Adams, Andoh, & Quarshie, 2013; Boadu, 2013). Dengan kata lain, tujuan pendidikan kewarganegaraan yaitu membentuk warga negara yang baik (*good citizen*).

Pendidikan kewarganegaraan memainkan peran mendasar dalam mendorong perilaku kritis dan menjawab isu globalisasi yang memengaruhi bangsa dan negara (Choo, 2015). Pendidikan kewarganegaraan menjadi ujung tombak dalam sebuah keberlangsungan negara. Oleh sebab itu, penting bagi suatu negara untuk terlibat aktif dalam keberlangsungan pendidikan kewarganegaraan. Keterlibatan ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan muatan pendidikan kewarganegaraan ke dalam kurikulum.

Pemahaman konsep kewarganegaraan kepada anak dapat dimulai dari usia 8 sampai 11 tahun (Waterson & Moffa, 2016). Usia tersebut jika dikategorikan ke dalam jenjang pendidikan maka berada pada jenjang sekolah dasar. Sekolah dasar berfungsi sebagai pondasi utama dalam membentuk manusia yang berkewarganegaraan baik. Melalui generasi yang selalu diberikan pemahaman pentingnya kewarganegaraan, diharapkan akan memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, muatan pendidikan kewarganegaraan dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah dasar.

Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar adalah mempersiapkan generasi penerus untuk terlibat aktif dalam demokrasi yang berlangsung di suatu negara. Sekolah harus membantu siswa memahami bagaimana identifikasi budaya nasional, regional, dan global saling terkait dan berkembang. Sis-

wa harus didorong untuk secara kritis memeriksa identifikasi dan mempunyai komitmen untuk memahami cara-cara kompleks di mana siswa saling berhubungan dalam berkehidupan (Banks, 2014; Boadu, 2013). Oleh sebab itu, pendidikan kewarganegaraan membantu siswa untuk lebih mengembangkan identitasnya dalam konteks kemanusiaan. Melalui muatan pendidikan kewarganegaraan juga sebaiknya dapat membantu siswa untuk memahami bagaimana budaya, negara, dan dunia saling terkait.

Membelajarkan konsep pendidikan kewarganegaraan harus dilakukan dengan benar dan dapat diterima oleh seluruh siswa. Materi pendidikan kewarganegaraan yang masih abstrak harus dipermudah. Hal ini ditakutkan, dengan kesalahan penerimaan konsep pendidikan kewarganegaraan yang salah, akan membentuk generasi yang egois, mementingkan dirinya maupun kelompoknya, dan tidak menghargai keberagaman. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Print & Coleman (2003) bahwa program pendidikan kewarganegaraan juga bisa memiliki efek buruk. Secara tidak sadar, kurikulum yang diintegrasikan dengan pendidikan kewarganegaraan berfungsi untuk memberikan pemahaman mengenai sikap kewarganegaraan. Jika tidak berhati-hati dalam menjalankan kurikulum ini, akan berdampak pada generasi yang menjadi terbelah, dimana konten yang mengandung nilai-nilai disalah artikan oleh siswa.

Branson (1999) menjelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam menghadapi kemajuan jaman diharuskan dapat mengembangkan *civic competences*. *Civic competences* merupakan kompetensi kewarganegaraan dimana di dalamnya terdapat aspek-aspek yang meliputi *civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan), *civic skills* (keterampilan kewarganegaraan), dan *civic disposition* (karakter kewarganegaraan). Dengan terjalinya kompetensi kewarganegaraan tersebut, diharapkan dapat mewujudkan warga negara yang terlibat aktif dalam suatu tatanan negara.

Ketidakhahaman akan pentingnya konsep pendidikan kewarganegaraan seringkali ditemukan di beberapa wilayah di Indonesia seperti banyaknya kericuhan, keributan, bahkan tawuran antar suatu golongan. Permasalahan tersebut muncul ketika warga yang terlibat belum mempunyai *civic knowledge*, *civic skills*, dan *civic disposition* yang baik. Kurangnya pemahaman akan pentingnya konsep bernegara menjadi pemicu permasalahan

yang multidimensi di beberapa wilayah di Indonesia. Rendahnya *civic skills* akan mendorong setiap warga kurang memperhatikan aspek bermasyarakat, dan minimnya *civic disposition* membuat warga melakukan aksi fisik secara anarkis, mementingkan dirinya bahkan kelompoknya sendiri.

Dari berbagai peristiwa yang terjadi akibat ketidakpahaman akan konsep bernegara, dapat diasumsikan bahwa warga yang terlibat belum memiliki *civic dispositions* (karakter kewarganegaraan). Banyaknya perpecahan yang terjadi di Indonesia terjadi karena setiap warga negara tidak menghargai keberagaman. Karakter terlalu mencintai daerah maupun golongannya inilah yang menyebabkan banyaknya perpecahan yang ada di Indonesia. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan yang diperlukan saat ini adalah pendidikan kewarganegaraan yang dapat mengembangkan aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan siswa sesuai dengan kebutuhan dunia abad XXI.

Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini akan membahas tentang pentingnya muatan pendidikan kewarganegaraan di lingkup siswa sekolah dasar sebagai upaya membelajarkan *civic knowledge*, *civic skills*, dan *civic dispositions* di lingkup sekolah dasar. Dengan mempelajari kompetensi kewarganegaraan sejak sekolah dasar, diharapkan siswa mempunyai pondasi yang kuat akan pentingnya konsep bernegara yang akan di implikasikan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara

### **Pendidikan Kewarganegaraan di Beberapa Negara**

Pendidikan kewarganegaraan telah menjadi bagian internal dari suatu sistem pendidikan, di mana di dalamnya menyertai pertumbuhan negara bangsa dan perluasan pendidikan publik di berbagai belahan dunia (Arthur, et al, 2008). Salah satu tujuan penting pendidikan pada umumnya dan pendidikan kewarganegaraan pada khususnya yaitu untuk menjaga ketertiban sosial dan kesetiaan terhadap suatu negara. Demokrasi di suatu negara dapat terlihat ketika warga masyarakat dapat mengkolaborasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kewarganegaraan yang demokratis (Boontinand & Petcharamesree, 2017). Dengan demikian, tujuan pendidikan di setiap negara mempunyai persamaan yaitu sebagai

sarana untuk mendidik warga negara agar dapat menjadi warga negara yang baik.

Di Afrika, pendidikan kewarganegaraan mengalami permasalahan, terutama di negara-negara di mana sistem demokrasi masih lemah dan tingkat pendidikannya masih rendah (Print & Coleman, 2003). Kondisi ini terjadi karena mayoritas negara-negara di Afrika merupakan negara berkembang di mana keadaan dalam suatu negara belum stabil baik diakibatkan oleh warga negaranya maupun adanya faktor eksternal. Negara-negara yang sistem demokrasi masih lemah dan pandangan terhadap pendidikan kewarganegaraan masih rendah berdampak pada keberlangsungan negara tersebut. Kurangnya sikap kewarganegaraan yang baik akan menimbulkan perpecahan dalam suatu negara, bahkan setiap golongan warga negara akan berlomba-lomba untuk mencari siapa yang lebih dominan. Oleh sebab itu, seringkali terjadi permasalahan di negara-negara Afrika yang masih berdemokrasi lemah seperti ketidakpercayaan terhadap pemerintah, adanya kelompok yang menginginkan pergeseran kekuasaan, maupun meningkatnya angka kriminalitas.

Namun tidak semua negara di Afrika mengalami permasalahan pendidikan kewarganegaraan, misalnya di Ghana. Di Ghana, pendidikan kewarganegaraan bukan hal yang baru. Hal ini dilihat sebagai persiapan para pemuda untuk melatih sikap tanggung jawab bernegara (Boadu, 2013). Pendidikan kewarganegaraan di Ghana menjadi bagian dari kurikulum sekolah dasar yang dibelajarkan di antara kelas 4 sampai kelas 6. Muatan pendidikan kewarganegaraan dimasukkan ke dalam kurikulum di tingkat sekolah dasar untuk membentuk siswa menghargai konsep dan nilai-nilai dasar yang mendasari tatanan politik, masyarakat yang demokratis dan tatanan konstutisional untuk memungkinkan siswa menegakkan dan mempertahankan konstitusi di Ghana.

Hal berbeda terlihat dari konsep pendidikan kewarganegaraan yang ada di Amerika Selatan, yaitu Kolombia. Peristiwa kekerasan dan konflik yang berkepanjangan terkait dengan kelompok-kelompok yang memperebutkan kekuasaan, kontrol obat-obatan terlarang, dan kontrol konflik tanah, pemerintah Kolombia telah mengembangkan dan merenapkan pendekatan preventif berbasis pendidikan untuk kekerasan dan pengembangan keterlibatan masyarakat (Edwards Jr, 2012). Melalui lang-

kah ini, dinas pendidikan di Kolombia memasukkan muatan kewarganegaraan, sebagai kombinasi pengetahuan dasar, baik dari segi kognitif, emosional, komunikatif, dan integrasi kompetensi yang memungkinkan seorang warga negara untuk bertindak secara konstruktif dalam masyarakat yang demokratis. Konsep pendidikan kewarganegaraan yang ada di Kolombia telah direncanakan sejak tahun 2004 untuk memenuhi standar kewarganegaraan yang digambarkan oleh Kementerian Pendidikan Kolombia dan yang dengan demikian berkontribusi pada orientasi kewarganegaraan pelajar pada saat ini (Chaux, 2009).

Di Asia, pendidikan kewarganegaraan biasanya ditemukan dalam kurikulum sekolah dalam bentuk kewarganegaraan dan pendidikan moral (Print & Coleman, 2003). Pendidikan moral yang dimaksudkan diharapkan mampu menjadi sarana dalam membentuk warga negara di Asia yang memahami konsep bernegara. Thailand merupakan salah satu negara yang pernah mengalami krisis dalam demokrasi. Beberapa dekade terakhir telah terjadi polarisasi politik yang semakin dalam dan meningkatnya kekerasan yang mengakibatkan dua kudeta, termasuk yang terakhir pada tahun 2014 yang dipimpin oleh “*National Council for Peace and Order*” (NCPO) yang berupaya memulihkan demokrasi sepenuhnya dan mengembalikan kebahagiaan kepada orang-orang di negara (Boontinand & Petcharamee, 2017). Oleh sebab itu, implikasi dari kurikulum dan praktik pendidikan di sekolah-sekolah Thailand yaitu untuk menanamkan kebaikan dan praktik warga negara yang demokratis. Pengembangan warga negara demokratis telah berkembang melalui pengajaran dan input pendidikan yang akan memungkinkan menanamkan nilai moral, etika, sipil, dan demokrasi dalam bernegara.

Di Indonesia, muatan pendidikan kewarganegaraan sudah lama terintegrasi dalam sistem pendidikan. Seiring pergantian kekuasaan dari orde lama, orde baru, dan masa reformasi, pendidikan kewarganegaraan mengalami perubahan nama, mulai dari kewarganegaraan, *civics*, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan moral Pancasila, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, dan pendidikan kewarganegaraan. Namun demikian, konsep yang dibelajarkan tidak berbeda jauh bahkan hampir sama yaitu membelajarkan konsep bernegara yang baik. Adanya persamaan dalam setiap perubahan tidak lepas dari dijadikannya

Pancasila sebagai nilai dasar dan titik sentral dalam pendidikan kewarganegaraan.

Dari keragaman pendidikan kewarganegaraan di berbagai negara, setiap konsep pendidikan kewarganegaraan yang dibelajarkan di suatu negara disesuaikan dengan kondisi negara yang sedang berlangsung dan yang akan datang. Muatan pendidikan kewarganegaraan di negara-negara Asia cenderung menekankan nilai-nilai tradisional, menanamkan nilai moral individu dan patriotisme. Jadi, penting bagi suatu negara untuk terlibat aktif dalam keberlangsungan pendidikan kewarganegaraan. Konsep pendidikan kewarganegaraan perlu diintegrasikan dalam proses pendidikan dalam suatu negara. Pengintegrasian dapat dilakukan dengan memasukkan muatan pendidikan kewarganegaraan ke dalam kurikulum. Di Indonesia, pendidikan kewarganegaraan digunakan sebagai sarana dalam mewujudkan warga negara yang baik (*good citizen*) dalam berbangsa dan bernegara.

### **Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar**

Pendidikan diperlukan untuk mempersiapkan warga negara untuk berpartisipasi secara efektif dalam sistem demokratis. Sekolah merupakan salah satu lembaga publik penting yang digunakan untuk mempersiapkan anak-anak dan remaja untuk terlibat dalam sistem demokratis (Eidhof, ten Dam, Dijkstra, & van de Werfhorst, 2016). Melalui sekolah, diharapkan siswa sejak dini diberikan dan diperkenalkan akan konsep demokrasi. Pembelajaran konsep demokrasi dapat dibelajarkan melalui muatan pendidikan kewarganegaraan di sekolah. Dengan demikian ada peran dalam sistem pendidikan untuk mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang patriotik, patuh, dan menghargai keanekaragaman dalam bernegara.

Muatan pendidikan kewarganegaraan di setiap jenjang pendidikan disesuaikan dengan tingkat perkembangan dan usia siswa. Pendidikan kewarganegaraan di sekolah menekankan kolaborasi antar sekolah dan masyarakat dan menyarankan kurikulum sekolah sebagai mekanisme potensial untuk memperbaiki jaringan sosial antara sekolah dan masyarakat (Mcmurray & Niens, 2012; Print & Coleman, 2003; Sim, 2005). Pendidikan kewarganegaraan juga harus membantu siswa mengembangkan identitas dan keterikatan pada masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan di jenjang seko-

lah dasar lebih memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter. Muatan materi yang dibelajarkan hanya berfokus pada pembentukan warga negara yang aktif yaitu mengembangkan potensinya agar menjadi warga negara yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab. Fokus pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar dapat terwujud apabila siswa mampu mengimplikasikan kompetensi kewarganegaraan.

Pemerintah telah mengintegrasikan muatan pendidikan kewarganegaraan dalam Kurikulum 2013 untuk sekolah dasar. Hal ini dimaksudkan agar sejak dini siswa sekolah dasar sudah memahami dan memaknai sikap berbangsa dan bernegara. Untuk mengantisipasi adanya gejala permasalahan dimasyarakat, sejatinya pemahaman berbangsa dan bernegara memang harus sejak dini dibelajarkan. Oleh sebab itu dibutuhkan kompetensi kewarganegaraan yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam membelajarkan muatan pendidikan kewarganegaraan.

Kompetensi kewarganegaraan di sekolah dasar dapat mencakup *civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan), *civic skills* (keterampilan kewarganegaraan), dan *civic dispositions* (karakter kewarganegaraan). *Civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan) yang dimaksud adalah pemahaman arti kewarganegaraan bagi warga negara. Melalui *civic knowledge*, siswa belajar pengetahuan tentang kewarganegaraan baik dari segi teori atau konsep berpolitik. Muatan materi pendidikan kewarganegaraan di lingkup sekolah dasar menjadi pondasi dasar bagi siswa dalam membentuk warga negara yang baik. Oleh karena itu, materi yang dibelajarkannya pun sangat beragam mulai dari kehidupan sehari-hari, bermasyarakat, hingga berbangsa dan bernegara.

*Civic knowledge* yang dibelajarkan di lingkup sekolah dasar bermuatan substansi yang meliputi kewajiban dan hak sebagai warga negara. Siswa belajar bagaimana pelaksanaan kewajiban di lingkup rumah, masyarakat, dan negara, serta hak-hak apa saja yang dapat diperoleh setelah siswa melaksanakan kewajibannya. Muatan materi pendidikan kewarganegaraan yang dibelajarkan dimaksudkan agar di dalam diri siswa tertanam sikap menjadi warga negara yang baik. Dengan de-

mikian, *civic knowledge* menjadi pondasi konsep menanamkan pengetahuan tentang kewarganegaraan bagi siswa yang kelak akan berkembang menjadi warga negara yang aktif.

*Civic skill* (keterampilan kewarganegaraan) yaitu perilaku atau tindakan dari warga negara yang mencerminkan konsep bernegara. Keterampilan kewarganegaraan merupakan implikasi dari *civic knowledge* yang diperoleh. *Civic skills* dapat digunakan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. *Civic skills* dalam pendidikan kewarganegaraan mencakup *intellectual skills* (keterampilan intelektual) dan keterampilan berpartisipasi (Cholisin, 2010). Keterampilan intelektual ini mencakup keterampilan berpikir kritis. Keterampilan berpikir kritis memang menjadi salah satu keterampilan yang harus dikembangkan di abad XXI. Banyak teori-teori yang menjelaskan pentingnya siswa menguasai keterampilan berpikir kritis. Namun demikian, dalam muatan pendidikan kewarganegaraan, keterampilan berpikir kritis sudah terintegrasi ke dalam pendidikan kewarganegaraan yang meliputi proses mengidentifikasi, mendiskripsikan, menjelaskan, menganalisa, mengevaluasi, menentukan dan mempertahankan pendapat yang berkenaan dengan masalah-masalah publik. Melalui proses berpikir kritis dalam pendidikan kewarganegaraan, siswa diharapkan dapat membedakan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dalam masyarakat dan bernegara.

Keterampilan partisipasi dalam *civic skills* (keterampilan kewarganegaraan) dimaksudkan agar keterlibatan warga negara melalui partisipasi dalam sistem pemerintahan dapat mewujudkan cita-cita demokrasi suatu bangsa. Keterampilan berpartisipasi dapat dicapai melalui kegiatan berinteraksi, kegiatan memantau perkembangan negara, dan kegiatan mempengaruhi warga negara. Dalam lingkup yang lebih luas, keterampilan partisipasi dapat diwujudkan dalam bentuk keterlibatan warga aktif seperti mengikuti kegiatan pemilu, ikut dalam partai politik, ikut terlibat dalam menjaga ketertiban, dan mengutamakan kepentingan umum. Bentuk keterampilan partisipasi warga negara dapat terlihat dari keterlibatan warga negara dalam sistem pemerintahan.

Kaitannya dengan *civic skills* (keterampilan kewarganegaraan) di lingkup sekolah dasar, siswa dapat diperkenalkan melalui proses demokrasi yang berlangsung di kelas.

Jika memungkinkan, suasana di kelas dibuat sedemikian sehingga terdapat birokrasi di kelas. Misalnya terdapat susunan jabatan di kelas, terdapat aturan yang harus dijalankan, dan adanya sanksi jika melanggar aturan. Adanya aktivitas musyawarah, diskusi kelompok, dan pemecahan persoalan di kelas dapat menjadi salah satu upaya dalam membelajarkan keterampilan kewarganegaraan. Hal ini akan terlihat ketika siswa berusaha menyelesaikan persoalan menggunakan pengetahuannya (*civic knowledge*) tentang apa yang harus dilakukan yang kemudian akan direalisasikan ke dalam suatu keterampilan pemecahan masalah.

Siswa juga perlu diperkenalkan pada konsep bentuk partisipasi dalam *civic skills*. Bentuk partisipasi di lingkup sekolah dasar dapat dibelajarkan lebih sederhana. Aktivitas yang diberikan masih dalam bentuk pondasi dasar seperti terlibat dalam pemilihan ketua kelas, terlibat dalam musyawarah di kelas, dan terlibat dalam diskusi kelompok. Kegiatan-kegiatan yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat aktif dapat mendorong terbentuknya siswa yang berpartisipasi.

*Civic disposition* merupakan kompetensi kewarganegaraan yang paling penting dan substantif. *Civic disposition* merupakan tujuan akhir (*final destination*) dari pendidikan kewarganegaraan karena merupakan pencerminan dan gabungan dari *civic knowledge* dan *civic skills*. *Civic disposition* (karakter kewarganegaraan) merupakan watak atau sifat yang harus dimiliki warga negara untuk mendukung keterampilan dan pengetahuan kewarganegaraan. *Civic disposition* bertujuan untuk mewujudkan dan menumbuhkan warga negara yang mempunyai karakter yang baik (Mulyono, 2017). Karakter ini dapat terlihat dari perbaikan karakter privat dan karakter publik. Karakter privat yang dimaksudkan meliputi sikap disiplin, tanggung jawab, maupun karakter menghargai keberagaman. Sedangkan karakter publik yaitu adanya sikap peduli, mempunyai nilai moral yang baik, dan mampu bekerja sama. Karakter privat lebih cenderung membentuk pribadi yang berguna bagi masyarakat dan negara. Karakter publik merupakan pondasi warga dalam mengutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi. Karakter publik inilah yang nantinya menjadi dasar warga negara dalam berinteraksi dengan berbagai macam golongan di masyarakat.

Muatan pendidikan kewarganegaraan terkait dengan *civic disposition* yang relevan untuk saat ini di sekolah dasar dan beberapa waktu yang akan datang adalah menambahkan muatan karakter dan menekankan rasa menghormati (*respect*) terhadap sesama warga negara. Karakter memiliki peran yang strategis dalam mewujudkan warga negara yang mempunyai pribadi yang baik dan berintegritas ke-Indonesia-an (Sukadari, Suyata, & Kuntoro, 2015). Karakter tidak dapat dipelajari dan dibelajarkan dalam waktu singkat. Karakter harus dibelajarkan secara berkelanjutan. Membangun komitmen bersama juga diperlukan dalam mengembangkan dan mewujudkan karakter pendidikan kewarganegaraan saat ini.

Fenomena yang terjadi di kalangan siswa saat ini yaitu adanya arus perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang semakin maju membuat tidak sedikit siswa yang lebih banyak meluangkan waktunya bermain *handphone*. *Game* yang ditawarkan juga sangat beragam. Terlebih lagi *game* yang disajikan sudah mampu menawarkan fitur interaksi dua arah. Dengan adanya fenomena seperti ini, sikap orientasi siswa mengalami perubahan, interaksi bertatap muka secara langsung sudah mulai menghilang dan akan digantikan oleh fitur chat bahkan bertatap muka melalui kamera dalam sebuah *game*. Jika fenomena ini semakin di biarkan, dikhawatirkan siswa mulai bersikap individualis dan mengabaikan kondisi sekitarnya. Akibatnya, siswa mulai memikirkan kepentingannya sendiri. Muatan pendidikan kewarganegaraan *civic disposition* akan mengalami perubahan. Orientasi pada kepentingan sosial dan umum akan berubah menjadi kepentingan pribadi. Siswa mengalami degradasi karakter, menjadi individu yang individualis, bahkan bisa dimungkinkan akan berkembang menjadi seorang yang acuh terhadap kondisi bangsa dan negara.

Terkait permasalahan tersebut, dalam ranah mengembangkan karakter siswa, Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo sudah mulai menerapkan PPK (Program Pendidikan Karakter). Kegiatan ini dimulai sejak awal tahun 2018. PPK dilaksanakan dengan mengikuti kegiatan SOP (Standar Operasional Prosedur) di pagi sebelum jam belajar dimulai dan siang hari setelah jam belajar selesai. Program ini diperuntukkan bagi TK/RA, SD/MI, dan SMP/MTS. Tujuan adanya PPK yaitu menumbuhkan karakter siswa agar mempunyai karak-

ter yang baik. Dalam melakukan pengawasan terhadap keterlaksanaan program PPK, pemerintah Kabupaten Kulon Progo memberikan ruang di mana sekolah dasar wajib melaporkan kegiatan PPK setiap harinya. Laporan yang diberikan berupa kegiatan sekolah dalam bentuk SOP pagi dan SOP siang dan aktivitas di sekolah dasar terkait dengan pendidikan karakter. Laporan dilaksanakan secara online melalui situs yang sudah dibuat oleh pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Program ini merupakan wujud realisasi dari pemerintah dalam upaya ikut serta dalam mengembangkan karakter. Dengan demikian, melalui komitmen pemerintah yang bekerjasama dengan sekolah, diharapkan siswa dapat meningkatkan karakter cinta tanah air dan mempunyai *civic disposition* yang baik.

### **Peran Guru dalam Membelajarkan Pendidikan Kewarganegaraan**

Pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar sangat efektif bila dilakukan secara berkelanjutan oleh guru. Guru menganggap institusi sekolah sangat efektif dalam memberikan kegiatan kewarganegaraan. Prioritas sekolah pada umumnya cenderung berfokus pada pertimbangan teoritis yang dirancang untuk mendukung pemahaman konseptual siswa terhadap kewarganegaraan dan keterlibatannya dengan masyarakat (Hampden-thompson, Bramley, Lord, & Jeffes, 2015). Memberikan pemahaman sikap saling menghargai sejak dini berperan penting dalam berinteraksi dengan masyarakat luas. Siswa yang memahami konsep saling menghargai tentu ketika tumbuh dewasa dapat menerima keberagaman dan perbedaan tersebut dalam bermasyarakat. Oleh sebab itu, pendekatan sekolah terhadap kewarganegaraan dan keterlibatan masyarakat dicirikan oleh berbagai kegiatan, dengan pendekatan yang paling umum berfokus pada pengembangan pemahaman siswa tentang peran dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara.

Guru yang membelajarkan muatan pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar perlu mengetahui tentang struktur dan komposisi silabus pendidikan kewarganegaraan (Adams et al., 2013). Guru harus mengetahui apa yang akan dibelajarkan agar tujuan pendidikan kewarganegaraan yang akan dibelajarkan tercapai. Materi abstrak yang ada dalam pendidikan kewarganegaraan harus sampai

kepada siswa dengan baik dan benar. Jika perlu, penggunaan media sebagai alat bantu penyampaian materi yang sulit dipahami siswa harus diadakan. Sebab, konteks materi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan identik dengan nilai-nilai kehidupan sehari-hari bahkan sangat abstrak dan sulit dipahami siswa. Hal ini karena siswa sekolah dasar masih dalam tahap operasional konkret, dimana materi abstrak masih sulit dipahami mereka.

Guru dapat memberikan pemahaman mengenai pendidikan kewarganegaraan kepada siswa sesuai dengan jenjang kelas, tentu apa yang diberikan untuk jenjang kelas rendah dan kelas tinggi berbeda. Guru dalam membelajarkan muatan pendidikan kewarganegaraan hendaknya sedini mungkin memberikan pemahaman dan memberikan contoh konkret dalam mendidik kewarganegaraan agar tertanam konsep kewarganegaraan yang benar dalam diri siswa. Pembiasaan-pembiasaan sikap kewarganegaraan yang dilakukan kepada siswa akan membuat siswa memahami mana yang baik dan mana yang tidak baik dalam kehidupannya. Mulai dari penanaman konsep demokrasi di dalam kelas, sikap patriotisme, dan nasionalisme.

Peran sekolah dapat dilakukan dengan menyediakan lingkungan yang demokratis di mana siswa dapat menggunakan cara hidup secara demokratis (Boontinand & Petcharamesree, 2017). Hal ini merupakan gagasan dari muatan pendidikan kewarganegaraan yang bermaksud untuk menumbuhkan sifat-sifat partisipasi, sosial, saling musyawarah, dan rasa hormat terhadap sudut pandang yang berlawanan. Dengan demikian, lingkungan demokratis di sekolah dapat menjadi kerangka konseptual mendidik siswa agar menjadi warga negara yang baik.

Pengalaman demokrasi siswa menjadi hal yang dapat diperoleh siswa ketika mentransformasi pendidikan kewarganegaraan diimplementasikan di kelas dan di sekolah. Siswa dapat menginternalisasikan asas demokrasi, nilai-nilai budaya, dan komitmen dalam dirinya dengan baik melalui pengimplementasian pendidikan kewarganegaraan di sekolah. Sikap patriotisme dan nasionalisme dapat ditunjukkan oleh guru dengan memberikan contoh sikap mencintai bangsanya, hormat terhadap peraturan pemerintah, dan berkehidupan sebagai warga negara. Guru harus mampu memberikan pemahaman kepada siswa bahwa

dalam suatu negara ada berbagai keragaman dan harus saling menghormati keragaman tersebut.

Terkait dengan konsep bernegara secara luas, siswa perlu diperkenalkan akan keberagaman yang ada di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan di mana terdapat lebih dari 17 ribu pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Keberagaman di Indonesia dapat terlihat dari berbagai suku, agama, ras, dan adat istiadat. Membelajarkan sikap saling menghargai sejak dini sangat berperan penting dalam berinteraksi dengan masyarakat luas. Sebagai bagian dari pendidikan multikultural, pendidikan kewarganegaraan memprioritaskan strategi pendidikan dengan menggunakan latar belakang budaya siswa sebagai salah satu kekuatan untuk membangun sikap multikultural (Gunartati, Zamroni, & Gafur, 2017). Pendidikan berbasis multikultural berusaha membantu mengintegrasikan seluruh bagian bangsa secara demokratis, menekankan perspektif pluralitas masyarakat, etnis, dan kelompok budaya. Siswa yang memahami konsep saling menghargai tentu ketika tumbuh dewasa dapat menerima keberagaman dan perbedaan dalam bermasyarakat.

Membelajarkan muatan pendidikan kewarganegaraan di lingkup sekolah dasar dapat dilakukan salah satunya dengan melihat secara langsung proses demokrasi di Indonesia. Tahun 2019 merupakan tahun politik, di Indonesia akan diadakan pemilu serentak untuk pertama kali sepanjang sejarah. Melalui peristiwa ini, siswa secara tidak langsung dapat dibelajarkan tentang kompetensi kewarganegaraan baik dari aspek *civic knowledge*, *civic skills*, dan *civic disposition*. Siswa akan belajar bagaimana aktivitas keterlibatan dalam suatu sistem pemerintahan, berbangsa, dan bernegara. Jika memungkinkan, siswa dapat diajak secara langsung melihat bentuk partisipasi warga negara ketika mengikuti pemilu. Hal ini diharapkan di dalam diri siswa tertanam konsep berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, sudah tidak ada lagi golput (tidak memilih) pada pemilu di masa yang akan datang.

Guru yang membelajarkan muatan pendidikan kewarganegaraan dapat mengantisipasi fenomena golput tersebut dengan memaksimalkan mendidik generasi baru sedini mungkin. Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-12 tahun di Indonesia pada tahun 2017 sebesar 99,14% (Badan Pusat Statistik, n.d.)

harus dibelajarkan mengenai pentingnya muatan pendidikan kewarganegaraan. Melalui generasi baru yang mengerti akan pentingnya pendidikan kewarganegaraan inilah, diharapkan akan memperbaiki demokrasi proaktif pada tahun-tahun berikutnya. Pencapaian hasil pendidikan kewarganegaraan dapat dilihat ketika siswa melakukan interaksi sosial dengan sesama teman, guru, maupun masyarakat dan berkontribusi dalam berbangsa dan bernegara.

## SIMPULAN

Sistem pendidikan Indonesia sejatinya telah mengembangkan muatan pendidikan kewarganegaraan yang diintegrasikan dalam kurikulum. Akan tetapi pada prosesnya masih banyak yang harus diperbaiki dan ditingkatkan kembali untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia juga tidak bisa lepas dari budaya dan keanekaragaman yang dimiliki. Hal ini dapat menjadi salah satu nilai utama yang bisa dikembangkan, yaitu pendidikan kewarganegaraan berbasis multikulturalisme yang ada di Indonesia. Artinya bahwa pendidikan dijalankan dengan tujuan untuk menciptakan generasi yang mampu bersaing di ranah global dan memiliki rasa nasionalisme serta toleransi yang tinggi terhadap keberagaman budaya.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari pendidikan kewarganegaraan di Indonesia tentu tidaklah mudah. Pemerintah, pendidik, orang tua, dan masyarakat secara keseluruhan harus gotong royong untuk mewujudkan ketercapaian pendidikan kewarganegaraan yang diharapkan. Guru atau pendidik harus memahami bahwa jaman bagi peserta didiknya akan berbeda dengan jaman yang saat ini dilaluinya. Selain itu, di masa yang akan datang, seorang anak akan bekerja pada jenis pekerjaan yang bisa jadi belum ada pada saat sekarang ini.

Tugas seorang guru dalam hal ini tidak semata-mata membelajarkan kemampuan kognitif pada peserta didik, tetapi bagaimana cara guru membelajarkan peserta didik untuk memiliki bekal terbaik bagi siswanya agar bisa *survive* di masa yang akan datang. Bekal yang dapat diberikan tersebut yaitu pengetahuan tentang kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) dan karakter kewarganegaraan (*civic dispositions*) yang baik. Dengan demikian, diharapkan akan



membentuk siswa yang kelak akan menjadi warga negara yang aktif. Sehingga tujuan pendidikan kewarganegaraan di lingkup sekolah dasar yaitu sebagai sarana dalam membentuk warga negara yang baik (*good citizen*) dapat tercapai. Ketercapaian pendidikan kewarganegaraan di lingkup sekolah dasar dapat terwujud jika siswa mempunyai *civic knowledge*, *civic skills*, dan *civic disposition* yang baik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adams, F. H., Andoh, S., & Quarshie, A. M. (2013). Effective Teaching of Citizenship Education in Primary Schools in Ghana. *Journal of Education and Practice*, 4(10), 18–23.
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). Angka partisipasi sekolah (APS) menurut provinsi, 2011-2017. Retrieved from <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1054>
- Banks, J. A. (2014). Diversity, Group Identity, and Citizenship Education in a Global Age. *Journal of Education*, 194(3). <https://doi.org/10.1177/002205741419400302>
- Boadu, K. (2013). Teachers' Perception on the importance of teaching citizenship education to primary school children in Cape Coast, Ghana. *Journal of Arts and Humanities*, 2(2), 137–147.
- Boontinand, V., & Petcharamesree, S. (2017). Civic/citizenship learning and the challenges for democracy in Thailand. *Education, Citizenship and Social Justice*, 1–15. <https://doi.org/10.1177/1746197917699413>
- Chaux, E. (2009). Citizenship Competencies in the The Colombian Educational Response. *Harvard Educational Review*, 79(1), 84–93.
- Cholisin. (2010). Penerapan civics skills dan civic dispositions dalam mata kuliah prodi PKn, (September), 1–11.
- Choo, S. S. (2015). Asia Pacific Journal of Education Citizenship education in Asia. *Asia Pacific Journal of Education*, (June), 37–41. <https://doi.org/10.1080/02188791.2015.1048764>
- Edwards Jr, D. B. (2012). Social movement oriented citizenship in Columbia: The effects of curriculum, pedagogy and extra-curricular activities on student orientation. *Education, Citizenship and Social Justice*, 7(2), 117–128. <https://doi.org/10.1177/1746197911432597>
- Eidhof, B. B. F., ten Dam, G. T. M., Dijkstra, A. B., & van de Werfhorst, H. G. (2016). Consensus and contested citizenship education goals in Western Europe. *Education, Citizenship and Social Justice*, 1–16. <https://doi.org/10.1177/1746197915626084>
- Gunartati, Zamroni, & Gafur, A. (2017). Inculcating Tolerance By Multicultural Based PPKN Learning. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, 5(2), 155–161.
- Hampden-thompson, G., Bramley, G., Lord, P., & Jeffes, J. (2015). Teachers' views on students' experiences of community involvement and citizenship education. *Education, Citizenship and Social Justice*, 10(1), 67–78. <https://doi.org/10.1177/1746197914568854>
- Mcmurray, A., & Niens, U. (2012). Building bridging social capital in a divided society: The role of participatory citizenship education. *Education, Citizenship and Social Justice*, 7(2). <https://doi.org/10.1177/1746197912440859>
- Mulyono, B. (2017). Reorientasi civic disposition dalam kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan sebagai upaya membentuk warga negara yang ideal. *Jurnal Civics*, 14(2), 218–225.
- Print, M., & Coleman, D. (2003). Towards Understanding of Social Capital and Citizenship Education. *Cambridge Journal of Education*, 33(1), 123–149. <https://doi.org/10.1080/0305764032000047522>
- Sim, J. B. (2005). Citizenship Education and *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi* Volume 6, No 2, December 2018

- Social Studies in Singapore: A National Age. *International Journal of Citizenship and Teacher Education*, 1(1).
- Sukadari, Suyata, & Kuntoro, S. A. (2015). Peneliti Etnografi Tentang Budaya Sekolah dalam Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, 3(1), 56–68.
- Waterson, R. A., & Moffa, E. D. (2016). Citizenship education for proactive democratic life in rural communities. *Education, Citizenship and Social Justice*, 1–18.  
<https://doi.org/10.1177/1746197916648286>